

PENGARUH BELANJA PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA

Angga Setiawan¹, Fikriah^{2*}

1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Syiah Kuala

2) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Syiah Kuala, Email:

haridhi_fikriah@unsyiah.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the impact of government spending on education, health, and social protection on the Human Development Index in Indonesia. The method used in this study is a panel data regression analysis method consisting of 34 provinces in Indonesia during the 2015-2018 period. Variables in this study include the Human Development Index (HDI) sourced from the central statistical agency or Badan Pusat Statistik (BPS), government spending in education, health and social protection are source from the General Directorate of Financial Balance or Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). The results showed that government spending in education and government spending in health had a positive and significant effect on the Human Development Index (HDI) value, while government spending on social protection had a negative and significant effect on the human development index (HDI) value.

Keywords: *Human Development Index, Education Spending, Health Spending, Social Protection Spending.*

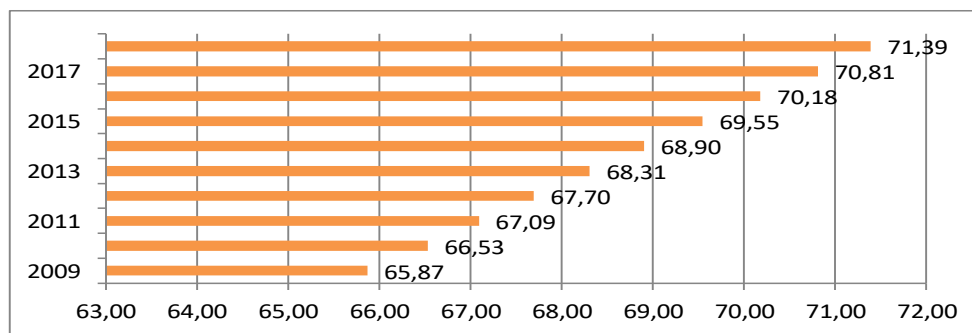
Abstak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh belanja Pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel yang terdiri dari 34 Provinsi di Indonesia selama periode 2015-2018. Variabel dalam penelitian ini antara lain indeks pembangunan manusia (IPM) yang bersumber dari badan pusat statistik (BPS), belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial bersumber dari direktorat jendral perimbangan keuangan (DJPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sementara pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kata Kunci: **Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Perlindungan Sosial.**

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi suatu negara oleh karena itu pembangunan manusia sangatlah perlu diperhatikan karena menurut Widodo dkk (dalam Kahang, 2016 : 131) dikatakan bahwa negara tersebut maju , bukan dinilai dari jumlah *Gross Domestic Product* (GDP) saja melainkan harus mempertimbangkan bidang pendidikan bahkan kesehatan masyarakat yang dicerminkan melalui pembangunan manusianya. (Mongan, 2019). IPM memberikan 3 indikator gabungan tentang pembangunan manusia yaitu kesehatan ditakar dari angka harapan hidup, pendidikan ditakar dari angka rata-rata lama sekolah penduduk serta kemampuan daya beli untuk mengukur standar hidup yang layak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statisti (BPS) Indeks Pembangunan Manusia Indonesia selama periode 2009-2018 terus mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini :



Sumber data : Badan Pusat Statistik Tahun 2020 (data diolah)

Grafik 1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (2009 – 2018)

Dari Grafik 1 terlihat peningkatan terus terjadi pada IPM Indonesia, selama periode 2009 - 2015 IPM Indonesia masih berada pada tingkatan kategori sedang, namun sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini IPM Indonesia sudah masuk pada tingkatan kategori tinggi yaitu mencapai angka 71,39 persen. Namun Berdasarkan data United Nations Development Programme (UNDP,2019) menunjukkan IPM Indonesia juga masih menjadi yang paling rendah diantara 5 negara tetangga yakni Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand. Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia berada pada kategori IPM sangat tinggi dan Thailand, Filipina berada posisi kategori tinggi sama hal nya dengan Indonesia. BPS (2018) secara nasional Indeks pembangunan manusia meningkat, tapi ketimpangan masih terjadi di 34 Provinsi di Indonesia. Hal disebabkan oleh tidak meratanya masyarakat di 34 Provinsi di Indonesia, Serta disparitas pada aspek pendidikan dan aspek ekonomi masih terjadi. Jika masyarakat merasa tidak sejahtera, secara keseluruhan dapat dikatakan tujuan pembangunan belumlah tercapai, dan perlu dilakukan evaluasi kinerja pemerintah dan masyarakat Indonesia. Faktor-faktor yang di duga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan IPM yaitu APBD untuk pendidikan, kesehatan serta untuk perlindungan sosial.

Untuk merangsang pertumbuhan IPM tersebut pemerintah harus mampu membuat kebijakan yang mampu menstimulasi pencapaian yang lebih tinggi, kebijakan fiskal yang tepat sangatlah berpengaruh terhadap hasil yang dicapai, salah satunya melalui kebijakan belanja pemerintah. Senjata utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan APBN dan APBD. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa tahun terakhir pemerintah terus meningkatkan jumlah alokasi belanjanya terutama pada belanja yang sesuai dengan fungsi

pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kualitas pembangunan manusia, Sebagaimana di gambarkan pada Tabel 1:

**Tabel 1 Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi 2015 - 2018
(Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan	%	Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan	%	Anggaran Belanja Fungsi Jaminan Sosial	%
2015	245.378.745,50	-	128.412.470,40	-	13.756.358.15	-
2016	235.953.248,00	-3,84	137.914.184,40	7,39	14.045.098.34	2,09
2017	263.826.408,70	11,81	150.171.599,50	8,88	15.701.904.54	11,79
2018	269.413.350,30	2,11	150.186.978,60	0,01	16.617.709.56	5,83

Sumber data : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Tahun 2020 (data diolah)

Tabel 1 Menggambarkan bahwa setiap tahun nya anggaran yang ditujukan untuk fungsi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial terus mengalami kenaikan selama empat tahun terakhir, namun untuk belanja pemerintah di sektor pendidikan mengalami penurunan anggaran pada tahun 2017 namun pada tahun berikutnya kembali mengalami kenaikan anggaran sebesar 11,81%. Mongan (2019) sebagai bentuk keseriusan pemerintah terhadap pembangunan manusia, maka dibuatlah pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang kemudian di amandemen ditahun 2009, Negara diamanatkan untuk mengalokasikan minimal 20 persen dari total APBN dan APBD untuk bidang pendidikan. Selanjutnya UU. No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 171, mengamanatkan pusat untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 5 persen dari APBN untuk bidang kesehatan, dan daerah diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari APBD.

Namun pengeluaran untuk perlindungan sosial juga diperhitungkan, karena pengeluaran pada bidang ini terus meningkat setiap tahunnya yang mana akan digunakan untuk mendanai program seperti Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan dan Indonesia Pintar, dan banyak lagi akan diluncurkan. Berjumlah masing-masing mencapai triliunan, dapat mencakup jutaan warga negara Indonesia. Dengan adanya banyak program ini, pemerintah telah menetapkan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketidaksetaraan yang dapat mendukung IPM Indonesia melalui salah satu faktor pengukuran utama kondisi ekonomi dalam hal daya belinya. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengeluaran Pemerintah (*Expenditure Government*)

Pada teorinya Adolf Wagner mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah terus meningkat setiap tahun karena peran *government* dalam aktivitas sosial kehidupan semakin bertambah. Ketika *per capita income* naik, demikian juga *expenditure government*. Ini terjadi karena hubungan sosial, hukum, pendidikan, rekreasi, budaya, serta lain sebagainya (Ferry Prasetya, 2012).

Belanja Bidang Pendidikan

Belanja pada bidang pendidikan merupakan belanja yang dipakai guna membiayai penyelenggaraan pendidikan yang merupakan tanggung jawab daripada Pemerintah, termasuk biaya membayar tenaga pendidik, akan tetapi tidak masuk di dalamnya anggaran untuk sekolah kedinasan. Belanja pada bidang ini adalah pengeluaran pemerintah sangat penting dan mendasar bagi pembangunan manusia. Seorang yang berpendidikan tentunya memiliki peluang besar untuk memperoleh pekerjaan leih baik sehingga bisa memperbaiki standar hidupnya untuk menjadi lebih baik. Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat maka pengalokasian anggaran pemerintah pada bidang pendidikan adalah bentuk konkret dari investasi sumber daya manusia (Todaro, 2000).

Belanja Bidang Kesehatan

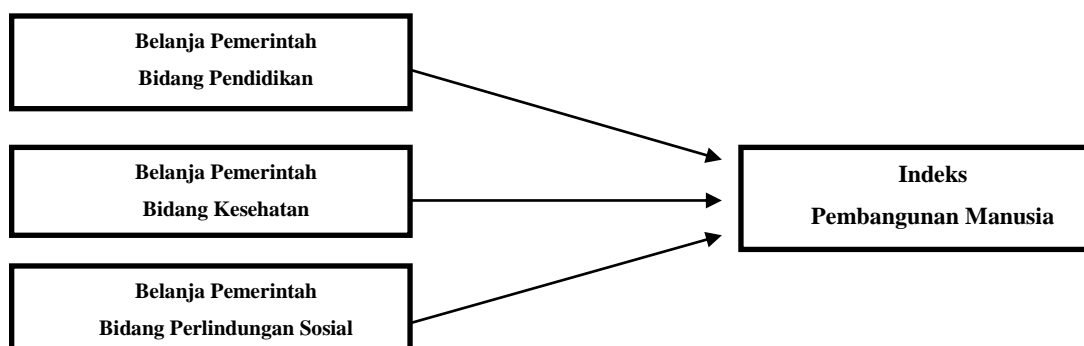
Belanja bidang kesehatan adalah belanja yang dipergunakan untuk bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat berpengaruh bagi IPM, karena kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat, maka daripada itu setiap warga berhak memperoleh kesehatan yang baik. Karena kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, apabila masyarakat sehat maka masyarakat akan sejahtera. Oleh karena itu penyelenggara pelayanan publik perlu memperhatikan bidang kesehatan (Todaro, 2000).

Belanja Bidang Perlindungan Sosial

Yaitu pengeluaran berbentuk barang/jasa maupun uang yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat tidak mampu, dengan tujuan melindungi masyarakat dari potensi risiko sosial dan meningkatkan kapasitas ekonomi atau kesejahteraan.

Indeks Pembangunan Manusia

IPM adalah gabungan 3 indikator bidang dasar: pendidikan, lama hidup dan standar hidup. Indikator lama hidup adalah indikator harapan hidup, indikator pendidikan/pengetahuan adalah harapan pendidikan jangka panjang dan periode pendidikan rata-rata, dan aspek standar kehidupan yang layak adalah daya beli (BPS , 2018). Fikriah, F. (2019) mengatakan untuk mengetahui keberhasilan sebuah kinerja negara dapat dilihat dari tingkat indeks pembangunan manusianya. Farlian, T. (2018) mengatakan Pembangunan di Indonesia bisa lebih baik jika indeks pembangunan manusianya ditingkatkan.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri dari 34 Provinsi di Indonesia dari tahun 2015 - 2018. Berbentuk data sekunder bersumber dari BPS dan DJPK. Data Yang dipakai adalah realisasi belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan social serta IPM 34 Provinsi di Indonesia.

Metode Analisis Data dan Pengujian Model

Model yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel, bertujuan melihat pengaruh dan hubungan berbagai variabel yang digunakan, Farlian, T. (2019) Metode regresi data panel, persamaannya dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 X_{1i,t} + \beta_2 X_{2i,t} \dots + E_{i,t} \dots \dots (1)$$

Bentuk regresi ini dapat ditransformasikan menjadi :

$$IPM_{i,t} = \alpha + \beta_1 Pend_{i,t} + \beta_2 Kes_{i,t} + \beta_3 PS_{i,t} + E_{i,t}$$

- Dimana :
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
 - α = Konstanta
 - β = Koefisien Regresi
 - Pend = Belanja Pendidikan
 - Kes = Belanja Kesehatan
 - PS = Belanja Perlindungan Sosial
 - i = 34 Provinsi Indonesia
 - t = Periode dari 2015-2018
 - e = error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model

1. Uji Chow

Merupakan uji yang dilakukan dalam menentukan model paling tepat dipergunakan dalam mengestimasi data panel antara CEM atau FEM.

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	140.738247	(33,99)	0.0000
Cross-section Chi-square	526.235901	33	0.0000

Tabel 2 menunjukkan hasil, untuk memilih antara CEM atau FEM dengan hipotesis:

H₀ : Pilih CEM

H₁ : Pilih FEM

Berdasarkan hasil dari Uji Chow di atas tingkat kepercayaan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H₀ ditolak. Artinya dipakai hipotesis H₁. Disimpulkan memilih *Fix Effect Model*.

2. Uji Hausman

Uji statistik guna memilih model paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel antara FEM atau REM .

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.689692	3	0.2970

Tabel 3 menunjukkan hasil Uji Hausman yang telah dilakukan guna memilih FEM atau REM dengan hipotesis:

H₀ : Pilih REM

H₁ : Pilih FEM

Dari uji di atas dengan tingkat kepercayaan $0,2970 > 0,05$ maka H₀ diterima. Artinya hipotesis yang digunakan H₀. Disimpulkan memilih *Random Effect Model*. Diakibatkan hasil yang tidak konsisten maka perlu dilakukan Uji *Langrange Multiplier*

3. Uji Langrange Multiplier

Uji statistik guna memilih manakah model paling tepat digunakan antara REM atau CEM :

Tabel 4 Hasil Uji Multiple Langrange

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	187.5921 (0.0000)	0.969319 (0.3249)	188.5615 (0.0000)
Honda	13.69643 (0.0000)	-0.984540 (0.8376)	8.988662 (0.0000)
King-Wu	13.69643 (0.0000)	-0.984540 (0.8376)	3.011193 (0.0013)
GHM	-- --	-- --	187.5921 (0.0000)

Tabel 4 menunjukkan hasil uji LM yang telah dilakukan untuk memilih REM atau CEM dengan hipotesis:

H₀ : Pilih CEM

H₁ : Pilih REM

Didapatkan nilai Pvalue yang kurang dari α , maka H₀ ditolak. Artinya hipotesis yang dipakai adalah H₁. Disimpulkan memilih *Random Effect Model*. Berdasarkan uji langrange Multiplier, dengan tingkat kepercayaan $0,000 < 0,05$ maka hipotesis H₁ diterima dengan model yang dipakai adalah REM , karena hasil yang ditunjukkan konsisten pada Uji *Hausman* dan Uji *Langrange Multiplier* yang memilih REM maka model yang digunakan untuk regresi data panel dengan IPM sebagai variabel dependen adalah REM.

Hasil Regresi Data Panel

Tabel 5 Estimasi Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.97942	0.658122	104.8124	0.0000
X1	1.93E-13	3.99E-14	4.838443	0.0000
X2	4.61E-13	1.72E-13	2.670371	0.0085
X3	-1.39E-12	5.73E-13	-2.422428	0.0168
R-squared	0.347143	Mean dependent var	5.654302	
Adjusted R-squared	0.332305	S.D.dependent var	0.760761	
S.E. of regression	0.621637	Sum squared resid	51.00914	
F-statistic	23.39606	Durbin-Watson stat	1.856841	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 5 menunjukkan hasil estimasi untuk menghitung seberapa besar variabel *independen* (belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) dapat menjelaskan variabel *dependen* IPM, yang ditunjukkan dari nilai R_{square} sebesar 0,347143, dimana sebesar 34,7 persen variabel-variabel bebas dalam model dapat menjelaskan variabel terikat sedangkan sisanya 0,653 atau 65,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi. Pada uji parsial ini terdapat 4 nilai pvalue yang berada di bawah α yang menyebabkan H_0 ditolak atau disimpulkan variabel tersebut signifikan berpengaruh terhadap IPM.

Dari hasil regresi menunjukkan hasil Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar 1,93E-13 dan tingkat kepercayaan sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil dari probabilitas 0,5 persen. Artinya, setiap kenaikan satu satuan belanja pada bidang ini, maka IPM akan bertambah sebesar $1,93 \times 10^{-13}$ dengan menganggap variabel lain constant. Hal yang sama juga terjadi pada Belanja Bidang Kesehatan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar 4,61E-13 pada tingkat kepercayaan sebesar 0,0085 berarti lebih kecil dari probabilitas 0,5 persen. Disimpulkan, setiap kenaikan satu satuan Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan, maka IPM akan bertambah sebesar $4,61 \times 10^{-13}$ dengan menganggap variabel lain constant. Sementara Belanja Bidang Perlindungan Sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar -1,39E-12 dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,0168 berarti lebih kecil dari 0,5 persen. Artinya, setiap kenaikan satu satuan Belanja Pemerintah pada bidang ini, maka IPM akan berkurang sebesar $1,39 \times 10^{-12}$ dengan menganggap variabel lain constant. Perlindungan sosial pada dasarnya adalah program yang menjamin serta melindungi hak kebutuhan dasar manusia, sehingga manusia tersebut dapat mencapai kesejahteraan. Jadi perlindungan sosial ini sangatlah dibutuhkan untuk mencegah terjadinya resiko yang tidak diinginkan seperti kemiskinan. Namun apabila anggaran perlindungan sosial setiap tahun nya terus meningkat ini artinya ada ketidak efektifan dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, yang awalnya bertujuan mencegah namun yang terjadi sebaliknya kemiskinan tidak terlalu menurun namun peningkatan jumlah masyarakat yang beresiko semakin tinggi, ini mencerminkan kalau perekonomian dan kesejahteraan tidak dalam kondisi yang baik. Apabila ini terus berkelanjutan maka IPM akan terus menurun karena masyarakat menjadi tidak mandiri hanya berharap kepada bantuan, namun apabila anggaran perlindungan sosial ini dapat diminimkan, maka akan dapat dimaksimalkan untuk digunakan pada bidang yang lebih prioritas,

seperti pendidikan dan kesehatan. Belanja perlindungan sosial boleh saja tinggi namun tidak dalam jangka waktu yang panjang. Karena apabila belanja perlindungan sosial ini dimanfaatkan secara maksimal dan tertuju kepada target yang tepat maka akan mampu menekan angka kemiskinan dan memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat, sehingga memberikan dampak yang positif terhadap IPM. Namun apabila belanja bidang ini tidak mampu menekan angka kemiskinan. Maka IPM akan terus menurun, dan terjadinya pemborosan anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan guna menguji pengaruh dari belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap IPM 34 Provinsi di Indonesia selama kurun waktu 2015-2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian sebagai berikut:

1. Belanja pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar $1.93E-13$ dan tingkat kepercayaan sebesar 0,0000 artinya lebih kecil dari probabilitas 0,5 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mongan (2019) dan Fahmi & Dalimunthe (2018)
2. Belanja pada bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar $4.61E-13$ dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,0085 yang berarti lebih kecil dari probabilitas 0,5 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pake,dkk (2018)
3. Sedangkan belanja pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar $-1.39E-12$ dengan tingkat kepercayaan sebesar 0,0168 artinya lebih kecil dari 0,5 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidarini & Bawono (2020) namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mailassa'adah (2017) yang menyatakan belanja perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Saran

Dari kesimpulan diatas, Peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat digunakan kedepannya.

1. Untuk pemerintah daerah, agar lebih bijak dan meningkatkan efektivitas daripada belanja pada ketiga bidang tersebut agar dapat memberikan dampak yang maksimal terhadap pertumbuhan IPM. Karena dengan pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran diyakini tujuan pembangunan manusia dapat tercapai dan ketimpangan di provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di seluruh Indonesia akan menurun.
2. Setiap Provinsi minimal pertahun harus mampu meningkatkan 1 persen pertumbuhan IPM nya, sehingga dalam 5 tahun yang akan datang IPM di Indonesia sudah berada pada kategori IPM tinggi dan sangat tinggi.
3. Untuk peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini agar menambah variabel terkait dengan peningkatan IPM.
4. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah data dan dukungan teori supaya lebih baik dan akurat hasil penelitian yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia*. Indonesia
- BPS. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia*. Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019 *Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi*. Indonesia.
- Fahmi, A. (2018). Pengaruh Good Governance, Belanja Fungsi Pendidikan Dan Kesehatan, Dan Pdrb Perkapita Terhadap Ipm. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 2(1), 23-34
- Farlian, T., Handayani, M., & Ardian. (2019). Firm Size, Market Risk, and Stock Return: Evidence from Indonesian Blue Chip Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 171-182.
- Hidarini, R. A., & Bawono, A. D. B. (2020). Peran Belanja Pendidikan Dan Belanja Perlindungan Sosial Sebagai Variabel Moderating Terhadap Hubungan Ruang Fiskal Dengan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) (Studi Empiris Di Seluruh Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2018).
- Iqbal, M., & Farlian, T. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pusat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 659-666.
- Isnadi, N., & Fikriah, F. (2019). Dampak Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 29-37.
- Kahang, M., & budi Suharto, R. (2017, January). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indkes pembangunan manusia di kabupaten kutai timur. In *FORUM EKONOMI* (Vol. 18, No. 2, pp. 130-140).
- Mailassa`adah. (2017). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan Sektor Perlindungan Sosial Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah*. Magister thesis,
- Misdawita & Sari, A. A. P. (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran Subsidi terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 147-161.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163-176.
- Pake, S. D. S., Kawung, G. M., & Luntungan, A. Y. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4).

Prasetya, F. (2012). Modul ekonomi publik bagian V: Teori pengeluaran pemerintah. *Malang: Universitas Brawijaya*.

Todaro, MP. 2000. Economic Development. Seventh Edition. Addition Wesley. New York.

UNDP. (2019). *Human Development Report. Beyond Income, Beyond Averages, Beyond Today: Inequalities In Human Development In The 21st Century*